

Peranan Kelembagaan Lokal “Blandongan” Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Lamongan

The role of Local Institutional "Blandongan" In the Capture Fisheries Management in Lamongan Regency

Budi Wardono

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Jl. Pasir Putih I, Ancol, Jakarta Pusat
Email: budi_ward@yahoo.com

Abstrak

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penghasil ikan tangkap laut terbesar di Jawa Timur, kontribusinya terhadap PDRB mencapai 17 % pada tahun 2013. Selain perannya yang penting dalam perekonomian daerah, kegiatan perikanan skala kecil banyak menghadapi permasalahan. Sumberdaya yang sudah mengalami degradasi, jumlah nelayan skala kecil yang jumlahnya sangat besar, menyebabkan usaha perikanan tangkap berpotensi menimbulkan konflik baik konflik dalam pemanfaatan sumberdaya maupun konflik sesama nelayan. Diperlukan kelembagaan lokal yang mampu menaungi kepentingan dan mengurangi potensi konflik yang terjadi pada nelayan skala kecil di Lamongan. Blandongan merupakan kelembagaan masyarakat lokal nelayan yang tumbuh dan berkembang atas inisiatif kelompok nelayan yang ada di masyarakat. Blandongan berfungsi sebagai fasilitator kepentingan nelayan, sehingga kepentingan nelayan dapat terakomodasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan kelembagaan lokal Blandongan dalam pengelolaan sumberdaya laut di Lamongan. Penelitian dilaksanakan pada bulan April – Agustus 2014 dengan lokasi di kawasan TPI Weru Komplek, Desa Weru, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis diskriptif dengan menggunakan teknik snowball, yaitu teknik penggalian informasi untuk menggali informasi secara bergulir, sehingga didapatkan informasi-informasi yang lengkap terkait dengan peranan kelembagaan lokal Blandongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blandongan mampu menjalankan perannya untuk memfasilitasi kepentingan nelayan dalam eksploitasi sumberdaya, sekaligus mampu mengurangi potensi konflik kepentingan antar kelompok nelayan yang mengeksploitasi sumberdaya pada kawasan yang sama. Peranan yang dijalankan meliputi peran ekonomi, peran sosial dan peran politik.

Kata Kunci: Blandongan, Kelembagaan Lokal, snowball, konflik, sumberdaya

Abstract

Lamongan Regency is one of the largest sea-captured fishery producers within the East Java Province, and 17 % of its 2013 regional gross domestic product alone was a contribution of sea-captured fishery. Despite the important role it has been playing for the regional economy, small scale fishery is facing multitude of problems. Natural resource degradation and a large number of small scale fishers have combined to create conflicts for natural resource usage between fishers. Therefore it is necessary to hamper the growing tension between fishers through a locally founded institution. A Blandongan is a local, fisher community institution that was established as an initiative of the local fishers community. Blandongan acts as a mean of facilitating fishers' stakes. This research was mainly aimed at acquiring information regarding the role of local institution – namely Blandongan – in the marine resources management in the Lamongan Regency. The research was conducted within April-August 2014 in the Weru Fish Auction, Weru Village, Paciran, Lamongan Regency. The approach utilized is a descriptive analysis of data collected through a snowball technique to dig information concerning Blandongan. The research has resulted in the finding of some facts that Blandongan has been successfully playing the role of facilitating fishers' stakes in resource exploitation, and furthermore, it has also been successfully hampering the rising conflicts among fishers who are exploiting the natural resource within the same location. Blandongan has been playing a few roles, such as: economic, social as well as political.

Keywords: Blandongan, Local Institution, Snowball, conflict, resource

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Karakteristik sumber daya perikanan bersifat *open access*, sehingga menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, dengan demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi (Satria, 2009). Menurut Polnak (1988) ciri-ciri perikanan skala kecil beroperasi di daerah yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya dan bersifat padat karya. Perikanan skala kecil juga dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), biasanya untuk pemenuhan sendiri (*subsisten*) yang sering disebut sebagai *peasant fisher*, yaitu karena alokasi hasil tangkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari pada yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha (Satria, 2009).

Permasalahan dari segi sumber daya perikanan adalah besarnya tekanan terhadap sumber daya perikanan yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan (Fauzi, 2010). Menurut data FOA tahun 2007 (dalam Fauzi, 2010) sekitar 28% dari stok ikan dunia sudah berada dalam kondisi *over exploited* maupun *depleted* (terkurus) dan 52% dalam kondisi *fully exploited*. Sedangkan data Komis Pengkajian Stock Ikan Nasional (Kajiskan) kondisi serupa juga terjadi pada perikanan Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena dua hal utama yaitu *overfishing* dan eksekspansi kapasitas (*over capacity*).

Permasalahan klasik nelayan kecil yaitu terbatasnya pengetahuan dan keterampilan nelayan, terbatasnya armada dan alat tangkap, kurangnya modal usaha, manajemen usaha bersifat tradisional dan teknologi terbatas, akses informasi dan pasar yang terbatas, terbatasnya prasarana, sarana dan institusi pendukung (BBPSEKP, 2012). Unit armada penangkapan yang dijalankan berupa perahu bermotor dengan ukuran kecil yaitu < 5 GT dengan

menggunakan alat tangkap berukuran kecil dan jangkauan penangkapan yang terbatas; bahkan di beberapa tempat dijumpai akses mereka terhadap faktor produksi utama (BBM) sangat terbatas dan pada posisi yang lemah.

Beberapa isu penting tentang keberlanjutan perikanan tangkap diantaranya adalah isu sumber daya, isu sosial dan ekonomi serta isu kelembagaan. Isu sumber daya meliputi kerusakan habitat, konflik penggunaan alat tangkap dan isu peningkatan upaya penangkapan (Kusnadi, 2002; FAO, 1999). Dalam konteks operasional, isu sumber daya juga terkait dengan aspek teknologi. Isu sosial dan ekonomi meliputi isu konflik antar nelayan, yaitu nelayan asli dan pendatang, perebutan sumber daya antar pengguna alat yang berbeda tingkat teknologinya dan faktor lainnya, sedangkan isu ekonomi dapat berupa rendahnya harga produk perikanan di tingkat nelayan.

Permasalahan dari segi sumber daya perikanan adalah besarnya tekanan terhadap sumber daya perikanan yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan (Fauzi, 2010). Isu yang dilaporkan mengisyaratkan bahwa masyarakat nelayan sebagai pelaku utama dalam perikanan di wilayah pantai memiliki kapasitas yang rendah dalam penentuan kebijakan pengelolaan perikanan.

Banyak permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat/nelayan skala kecil yang menyebabkan tekanan untuk mempertahankan sumber mata pencaharian (Sudarmo *et al.*, 2015; Fauzi dan Anna, 2010; Kramer *et al.*, 2002; Sievanen, 2014). Seperti di banyak bagian dunia, nelayan skala kecil menghadapi banyak tantangan seperti persaingan dengan wisata pantai dan sektor perikanan lainnya, penurunan stok ikan, variabilitas iklim, dan fluktuasi pasar (Sievanen, 2014). Kondisi terakhir, stock sumber daya dan mata pencaharian dari

kegiatan penangkapan perikanan banyak mengalami penurunan, dan penurunan ini diperparah oleh ketidakpastian terkait dengan peningkatan variabilitas dan perubahan iklim (Sievanen, 2014; Fauzi dan Anna, 2010).

Interaksi nelayan-pedagang perantara/langgan merupakan fenomena umum yang terjadi di hampir semua komunitas nelayan kecil, interaksi tersebut memunculkan jargon *patron-client* antara juragan dengan nelayan. Hubungan "*patron-client*" telah lama berperan dalam pemanfaatan sumberdaya laut di Asia Tenggara (Merlijn 1989; Pelras 2000). Sifat dari hubungan tersebut menggambarkan hubungan vertikal, dimana patron sebagai "*superior*" dan client/nelayan sebagai "*inferior*" (Lande, 1977).

Hubungan interaksi *patron-client* didasari oleh alasan ekonomi dan kepentingan kedua belah pihak yang seharusnya saling menguntungkan. Dalam prakteknya sering terjadi hubungan eksploitatif antara kedua belah pihak, dimana pihak patron sering menggunakan kekuasaan sebagai sumber penyedia modal kepada nelayan yang posisinya lebih lemah. Sementara peran lembaga keuangan formal belum bisa memenuhi kebutuhan nelayan, sehingga nelayan lebih sering menggunakan sumberdana operasional dari langgan/pedagang perantara. Fakta yang muncul tidak ada pihak yang ingin menyelesaikan hutang-piutang yang berjalan, selama kepercayaan di antara tengkulak/langgan dengan nelayan tersebut masih ada, tidak ada alasan untuk khawatir tentang transaksi keuangan (penyelesaian hubungan hutang piutang).

Dominasi nelayan skala kecil tersebut membawa ke isu-isu aksi kolektif, kekuasaan, dan resolusi konflik. Perikanan tangkap skala kecil sering didasarkan pada komunitas kecil di pesisir yang tergantung pada sumber daya lokal yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan

ekonomi disekelilingnya baik negatif maupun positif.

Kelembagaan yang berkembang di Lamongan adalah kelembagaan yang tumbuh dari bawah yang dinamakan Blandongan. Kelembagaan ini beranggota 60-80 orang setiap Blandongan. Tiap desa bisa ada 6-9 Blandongan. Pada tingkat desa Blandongan tersebut membuat asosiasi yang dinamakan Rukun Nelayan (RN), dan kumpulan RN-RN membentuk kelembagaan ditingkat Kabupaten yaitu HNSI. Kelembagaan tersebut mampu memenuhi kepentingan anggota-anggotanya, kelembagaan ini terus eksis dan menjadi bagian penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan. Sebagian besar sifat usahanya adalah tradisional, dimana peran "agen" masih cukup dominan, meskipun dalam beberapa tahun belakangan dengan semakin bertambah luasnya pengetahuan dan kesadaran, peran "agen" semakin mengecil.

Kelembagaan lokal yang berkembang di kawasan nelayan, bisa memainkan peran sentral yang diharapkan mampu menjadi katalisator bagi kepentingan nelayan. Kelembagaan lokal yang tumbuh berdasarkan kepentingan nelayan tersebut mempunyai berbagai fungsi baik fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi politik, fungsi inovasi teknologi dll. Dalam hubungan usaha patron client sering memunculkan hubungan negatif yang sering merugikan nelayan. Peranan kelembagaan lokal diharapkan mampu memerankan fungsi-fungsi tersebut, dan bisa menjadi katalisator hubungan patron client yang lebih mengedepankan hubungan yang bersifat positif. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan kelembagaan lokal Blandongan dalam berbagai aspek dalam pengelolaan sumberdaya laut di Lamongan

Budi Wardono: Peranan Kelembagaan Lokal “Blandongan” Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Lamongan

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Weru Klomplek, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Weru Komplek terdiri dari empat desa yaitu Weru, Waru Lor, Paloh dan Sidokumpul. Keempat desa tersebut mempunyai tempat pendaran ikan (TPI) di desa Weru. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-April 2014.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para pelaku usaha mulai dari nelayan, pedagang, pengolah dan insdutri perikanan terutama industri skala kecil. Data sekunder diperoleh dari isntansi PBS, PPN dan sumber-sumber lainnya.

Analisis data

Nelayan di kabupaten Lamongan mempunyai kelembagaan spesifik yang dibangun dari bawah (*bottom up*) yang mempunyai kekuatan (posisi tawar) yang cukup kuat. Kelembagaan tersebut ada dari tingkat kelompok masyarakat, desa dan Kabupaten. Blandongan merupakan kelembagaan kelompok nelayan yang berada di tingkat dusun/RT/wilayah, setiap desa mempunyai 6-9 Blandongan dengan anggota 60-80 nelayan. Blandongan berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan kelompok nelayan disuatu wilayah. Kumpulan blandongan membentuk asosiasi yang dinamakan Rukun Nelayan (RN) di tingkat desa, anggotanya adalah blandongan-

blandongan yang ada di desa tersebut. Kabupaten Lamongan mempunyai 16 desa pesisir yang setiap desa mempunyai Rukun Nelayan (RN). Asosiasi Rukun Nelayan (RN) membentuk lembaga tingkat kabupaten yang diwadahi melalui asosiasi HNSI yang anggota-anggotanya terdiri dari Rukun Nelayan (RN) se Kabupaten Lamongan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik *snowball*, yaitu teknik penggalian informasi untuk menggali informasi secara bergulir, sehingga didapatkan informasi-informasi yang lengkap terkait dengan peranan kelembagaan lokal Blandongan.

Hasil dan Pembahasan

Keragaan Perikanan Lamongan

Apabila dilihat dari karakteristik pada perikanan skala besar dan skala kecil, dapat dibedakan dari berbagai hal. Tabel 1 menyajikan perbedaan karakteristik Perikanan skala besar dan perikanan tangkap skala kecil (diadop dari Smit, 1979; Berkes, 2001; World Bank, FAO and Wordl Fish Center, 2010). Pembagian karakteristik didasarkan atas bebrbagai hal, mulai dari kepemilikan, ukuran dan berat kapal, investasi, alat tangkap, prosesing dan pemasaran. Pembagian tersebut lebih didasrakan kemampuan armada dalam penangkapan ikan dan investasi yang ditanamkan dalam usaha penangkapan. Perikanan skala kecil dan artisanal biasanya dengan modal yang kecil dan dimiliki perorangan. Hasil tangkapan sebagian di jual dan sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 1 Karakteristik Perikanan Tangkap Skala Besar dan Skala Kecil
Table 1 Characteristic of Small dan Large Scale Fisheries

Karakteristik terkait Perikanan	yang dengan	Kategori			
		Skala Besar	Skala Kecil		Subsisten
		Industri			Artisanal
Kepemilikan		Terkonsentrasi pada beberapa orang.	Dimiliki seseorang atau bersama-sama		Dilaksanakan oleh pemilik sendiri
Perahu		Berukuran besar dan banyak peralatan	Kecil, mesin didalam (atau motor temple)		Perahu kecil, biasanya tidak bermotor
Jenis-jenis peralatan		Terbuat dari mesin, dibuat oleh pihak lain	Sebagian atau semua terbuat dari mesin.		Alat-alat buatan sendiri.
Investasi		Tinggi	Sedang sampai rendah.		Rendah
Tangkapan (per unit perikanan)		Besar	Sedang ke rendah		Rendah ke sangat rendah
Penjualan tangkapan	hasil	Dijual ke pasar-pasar terorganisir	Diorganisir penjual lokal		Dikonsumsi keluarga dan dijual
Pengolahan tangkapan	hasil	Kebanyakan fishmeal	Pengeringan, pengasapan, penggaraman		Sedikit atau tidak sama sekali yang di olah
Tingkat pendapatan		Seringkali tinggi	Sedang ke rendah		Minimum
Integrasi dengan ekonomi		Formal, terintegrasi penuh	Sebagian terintegrasi		Informal; tidak terintegrasi
Pekerjaan		Penuh waktu atau musiman	Seringkali multi pekerjaan		Multi pekerjaan
Tingkat pemasaran		Produk ditemukan diseluruh dunia	Seringkali nasional atau local		Lokal atau hanya level kabupaten
Pengelolaan kap'asitas perikanan	otoritas	Terkelola dengan baik, dengan banyak ilmuwan dan manajer	Minimal ke moderat, dengan sedikit ilmuwan/manajer		Seringkali tidak dikelola kecuali oleh pamakai sumber daya
Koleksi perikanan	data	Tidak terlalu sukar, dengan kapasitas dari otoritas perikanan	Sukar karena kondisi perikanan dan pelaksana		Seringkali tidak ada data yang bisa dikumpulkan karena sukar

Sumber: (diadopsi dari Smit, 1979; Berkes, 2001; Wordl Bank, FAO and Wordl Fish Center, 2010 dalam Bjorndal *et al.*, 2014).

Perikanan di pantai utara Jawa, khususnya perikanan tangkap skala kecil diperairan pantai Kabupaten Lamongan mempunyai karakteristik yang berbeda. Konsentrasi utama perikanan di pantai utara Lamongan didominasi oleh kapal-kapal skala kecil dengan produksi sebagian besar adalah ikan pelagis kecil dan demersal. Sentra industri pengolahan berskala besar dan kecil telah banyak berkembang. Karakteristik perikanan tangkap skala kecil di Lamongan dicirikan: sebagian besar dengan armada kecil kurang dari 5 GT, alat tangkap utama Payang dan Gill net. Kedua alat tangkap tersebut

mempunyai perbedaan dimana sering menimbulkan konflik antar kelompok nelayan. Alat tangkap Payang biasanya bisa menangkap hasil yang jauh lebih banyak karena semua jenis ikan dapat tertangkap, alat tangkap ini sering disebut *mini trawl*. Sedangkan alat tangkap gill net lebih ramah lingkungan dengan target tangkapan jenis ikan dengan ukuran tertentu.

Lamongan merupakan satu sentra perikanan di Pantai Utara Jawa Timur, Tabel 2 menyajikan komposisi kapal penangkap berdasarkan jenis mesin dan tonase kapal di lokasi Kabupaten

Budi Wardono: Peranan Kelembagaan Lokal “Blandongan” Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Lamongan

Lamongan. Struktur armada penangkapan ikan di Indonesia sebagian besar menggunakan kapal berukuran kecil (kurang dari 10 GT) (KKP, 2013). Armada penangkapan di lokasi penelitian

mempunyai karakteristik yang berbeda. Armada di Lamongan sebagian besar terdiri dari kapal tradisional yang sudah sejak lama beroperasi di wilayah Lamongan (Tabel 2).

Tabel 2 Komposisi kapal dan Jenis Alat Tangkap di Kabupaten Lamongan
Table 2 Ship Composition and Type of Catching Tools in Lamongan District

No	Ukuran kapal	Jumlah	%	Jenis Kapal	Alat tangkap
1	PMT	2.408	31,99	Kapal Ijon-Ijon (5-20 GT)	Dogol, Gill net Rawai dasar Pancing ulur
2	KM 5 - 10 GT	2.422	3,18	BC, 10-20 GT)	Payang Colleting
3	KM 10 - 20 GT	1.592	21,15	Jaten Paciran (1-3 GT)	Bubu dan Jaring Rajungan
4	KM 20 - 30 GT	1.105	14,68	Kapal EtheK/ Bokongan (15-20 GT)	Purse Seine Jaring cakalang

Sumber : Dinas KP Kabupaten Lamongan, 2013

Di Kabupaten Lamongan aktifitas perekonomian yang bersumber dari perikanan tangkap laut terutama berpusat di PPN Brondong. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Lamongan ditopang oleh tersedianya fasilitas: memiliki lima sentra produksi perikanan tangkap yaitu: (TPI Weru, TPI Kranji, PPN Brondong, TPI Labuhan dan TPI Lohgung); jumlah nelayan 28.154 orang dengan produksi 70.150 ton (tahun 2014); terdapat $\pm$ 7.526 unit armada perikanan tangkap (5–20 GT) dengan jumlah alat tangkap $\pm$ 8.395; terdapat 8 unit industri pengolahan ikan (UPI), 252 unit pengolah skala rumah tangga/UMKM. Daerah *fishing ground* tidak jauh dari *base camp*/PPN Brondong (perairan Masalembo, Matasiri, Bawean dan Utara Laut Jawa).

Dalam konteks hubungan eksploitasi sumber daya perikanan, masyarakat nelayan terdapat empat perilaku sebagai berikut: (1) mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan tanpa memahami batas-batasnya;

(2) mengeksploitasi sumber daya perikanan, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut; (3) mengeksploitasi sumber daya perikanan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan, melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti trawl atau minitrawl; serta (4) mengeksploitasi sumber daya perikanan dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan (Kusnadi, 2009). Perilaku eksploitatif yang tak terkendali berimplikasi luas terhadap kelangkaan sumber daya perikanan dan kemiskinan nelayan. Di samping itu, kompetisi antar nelayan dalam memperebutkan sumber daya perikanan terus meningkat, sehingga berpotensi menimbulkan konflik secara

eksplosif di berbagai wilayah perairan, khususnya di kawasan yang menghadapi kondisi *overfishing* (tangkap lebih).

Perikanan skala kecil sebagai sumber pendapatan bagi jutaan orang di seluruh dunia, namun perikanan tangkap skala kecil umumnya kurang didokumentasikan dan dampaknya tidak dipahami dengan baik. Peningkatan dokumentasi perikanan tangkap skala kecil diperlukan untuk mengukur *trend* global, mengidentifikasi ancaman terhadap keberlanjutan usaha, dan menilai pilihan manajemen (Lunn and Dearden, 2006). Perikanan tangkap skala kecil mempunyai arti penting bagi perekonomian lokal atau nasional, tidak hanya mencakup tenaga kerja yang diciptakan dalam sektor itu sendiri (Bene, 2006), tetapi juga terhadap yang diciptakan di sektor-sektor terkait lainnya. Perikanan tangkap pada bagian hulu adalah kegiatan-kegiatan memasok masukan atau input kepada sektor penangkapan. Banyak input yang biasanya disediakan oleh individu skala kecil atau usaha mikro terletak di dekatnya dalam wilayah pedesaan setempat, meskipun beberapa hal misalnya alat tangkap dan bahan bakar (diproduksi pihak lain yang lebih jauh baik nasional maupun internasional) namun disediakan secara lokal melalui bisnis lokal/pedagang.

Perikanan skala kecil memainkan peran yang lebih besar tidak hanya dalam hal penyerapan tenaga kerja di daerah pesisir tetapi juga dalam hal mata pencaharian dalam arti yang lebih luas. Sekitar 2,1 juta orang bekerja di sektor perikanan dan, meskipun sebagian tidak secara resmi tercatat dalam data statistik, mereka memainkan peran penting untuk ketahanan pangan, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan (Bene, 2006; FAO, 2005). Meskipun penting, nelayan skala kecil menghadapi berbagai kendala terutama dalam perspektif kebijakan dan perspektif sosial ekonomi. Dari perspektif kebijakan, program pemerintah yang ditujukan untuk nelayan skala kecil karena

sifat dari perikanan skala kecil yang sering menghadapi ketidakpastian. Dari perspektif sosial ekonomi, mata pencaharian masyarakat pesisir rentan terhadap guncangan dan perubahan mendadak, merupakan permasalahan perikanan yang sebagian besar penduduknya tergantung pada sumber daya laut (Ferrol-Schulte *et al.*, 2015; Fauzi dan Anna, 2010; Sievanen, 2014). Memahami kondisi tersebut, maka merupakan hal yang penting untuk lebih memperhatikan nelayan skala kecil dan mengembangkan kebijakan direktif yang lebih baik di masa depan. Pemahaman meliputi bagaimana nelayan skala kecil mengatasi ketidakpastian dan biaya operasional yang tinggi serta bagaimana jaringan sosial di masyarakat pesisir.

Hal ini diakui bahwa nelayan skala kecil telah mengembangkan berbagai strategi untuk menghadapi ketidakpastian (Fauzi dan Anna, 2010; Salmi, 2015; Allison, 2001). Salah satu strategi tersebut adalah keterikatan dengan pedagang perantara/pengepul/ langgan untuk menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk biaya operasional penangkapan dan keperluan lainnya yang tidak dapat dicukupi oleh nelayan. Keterikatan yang kuat dengan tengkulak cukup umum terjadi untuk perikanan skala kecil di Indonesia. Terlepas dari pandangan konvensional bahwa kehadirannya mungkin tidak menguntungkan dari sudut pandang sosial, keberadaan tengkulak/langgan, sampai batas tertentu telah menciptakan saling ketergantungan antara nelayan skala kecil dan pelaku ekonomi lainnya di masyarakat pesisir. Usaha perikanan tangkap skala kecil memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan usaha di sektor lain. Kegiatan perikanan tangkap penuh dengan tantangan serta dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian, dilain pihak kontribusi perikanan tangkap skala kecil dalam pembangunan nasional kurang diperhitungkan (Allison dan Ellis, 2001). Alasan inilah yang menjadi hambatan terbesar nelayan untuk mengakses sumber-

Budi Wardono: Peranan Kelembagaan Lokal “Blandongan” Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Lamongan

sumber permodalan dalam rangka peningkatan skala usaha.

Banyaknya unit penangkapan skala kecil dan jumlah nelayan yang terlibat dalam usaha penangkapan dilaut diperlukan kebijakan yang berpihak kepada para pelaku usaha terutama pada nelayan skala kecil. Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan yaitu: bahwa jumlah nelayan yang banyak dan kondisi kesejahteraan masih rendah, serta perikanan tangkap skala kecil secara nyata memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dari pada data yang tercatat, namun dipihak lain masih kurangnya perhatian terhadap perikanan tangkap skala kecil.

Berbagai permasalahan perikanan tangkap skala kecil yang sering dihadapi antara lain ketidak mampuan dalam permodalan, ketergantungan kepada tengkulak/pemodal, harga jual ikan yang ditentukan oleh bakul, ketidakmampuan dalam menghadapi kondisi alam yang

buruk (angin, cuaca dan ombak/ gelombang), rendahnya pendidikan mempengaruhi ketrampilan sehingga pada saat kondisi cuaca buruk tidak mempunyai alternative pekerjaan lain. Kondisi tersebut diperparah oleh kebiasaan hidup boros nelayan dan tidak mempunyai kebiasaan menabung. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan sosial terutama pada saat masa paceklik.

Tabel 3 merupakan review dari berbagai nara sumber kunci selama penelitian dan merupakan aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap. Terdapat beberapa perbedaan kondisi sosial ekonomi di kedua lokasi, yang menggambarkan bagaimana para pelaku usaha berinteraksi. Perikanan tangkap skala kecil mempunyai arti penting bagi perekonomian lokal atau nasional, tidak hanya mencakup tenaga kerja yang diciptakan dalam sektor itu sendiri (Bene, 2006), tetapi juga terhadap sektor lain yang diciptakan di sektor-sektor terkait lainnya.

Tabel 3 Karakteristik perikanan dan nelayan di Lamongan
Table 3 Characteristic of Fisheries dan Fisherman in Lamongan Distric

No	Uraian	Lamongan
1.	Wilayah pengelolaan	WPP 712 Laut Jawa, potensi produksi 836.000 ton/thn; tingkat ekstraksi 886.479 ton/thn.
2.	Karakteristik SDI	Dominasi jenis ikan pelagis kecil
3.	Kondisi sumber daya	Sebagian dari sumber daya ikan sudah dalam kondisi full atau bahkan over fishing
4.	Produksi dan Share produksi terhadap produksi propinsi	Produksi 70.000 ton/tahun, mempunyai kontribusi lebih dari 17% dari total produksi Jawa Timur, dengan rata-rata pertumbuhan 2,8% per tahun
5.	Keterlibatan nelayan	Lebih dari 28.000 nelayan dan lebih dari 7.500 alat tangkap
6.	Karakteristik nelayan	Mayoritas nelayan skala kecil kurang dari 5 GT. nelayan besar relatif tidak menonjol
7.	Kelembagaan pelaku usaha	Kelembagaan lokal (Blandongan) sangat kuat untuk memperjuangkan kepentingan nelayan
8.	Hubungan antar pelaku usaha	Hubungan nelayan dengan langgan/pengepul cukup kuat, faktor kepentingan ekonomi namun fungsi sosial juga cukup kuat

Sumber: Analisis data primer

Peran Kelembagaan Lokal

Keberadaan tata kelola patron-klien sebagai bentuk umum hubungan yang

umum pada perikanan skala kecil. Strategi patron-klien menjadi bentuk yang lebih umum dari organisasi yang nelayan, yang mampu menekan biaya transaksi (Basurto *et al.*, 2013. Lebih lanjut Basurto *et al.*, 2013 menggarisbawahi kebutuhan untuk lebih menonjolkan hubungan penting bahwa perantara/langgan, pembeli ikan, dan pelanggan berperan penting dalam perikanan skala kecil. Hubungan “*patron-client*” telah lama berperan dalam pemanfaatan sumber daya laut di Asia Tenggara (Merlijn 1989; Pelras 2000). Sifat dari hubungan tersebut menggambarkan hubungan vertikal, dimana patron sebagai “*superior*” dan client/nelayan sebagai “*inferior*” (Lande, 1977). Meskipun menggambarkan hubungan superior-inferior, namun terjadi hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak (Powel, 1970). “Client”/nelayan menerima ketidaksetaraan karena pelanggan/tengkulak memberikan jaminan sosial dan material dengan imbalan hasil tenaga kerja dan jasa (dalam bentuk ikan). Máñez dan Ferse (2010) berdasarkan indikator pasar, pelanggan/tengkulak berfungsi terutama sebagai inovator bisnis dengan kesediaan untuk membeli semua komoditas ikan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan “*client*” untuk beralih target dalam penangkapan. Secara umum, prosedur pinjaman dan hal-hal terkait disepakati secara informal, *client* mempunyai kewajiban moral untuk menjual semua hasil tangkapan kepada tengkulak/langgan yang memberikan pinjaman.

Fakta yang muncul tidak ada pihak yang ingin menyelesaikan hutang-piutang yang berjalan, selama kepercayaan di antara tengkulak/langgan dengan nelayan tersebut masih ada, tidak ada alasan untuk khawatir tentang transaksi keuangan (penyelesaian hubungan hutang piutang). Akibatnya, pembayaran tidak pernah tetap, baik dalam waktu maupun dalam angsuran. Pembayaran tergantung pada hasil tangkapan harian dari nelayan. Merlijn (1989) menyimpulkan, hubungan keseluruhan antara perantara/ tengkulak/langgan dan nelayan,

semacam kesepakatan sosial yang saling menguntungkan. Nelayan perlu menjual komoditas ikan yang sangat mudah rusak tanpa penundaan, nelayan perlu memiliki akses langsung ke tengkulak/langgan tanpa jaminan dan tanpa formalitas yang rumit, dan untuk mendapatkan input yang digunakan untuk operasional penangkapan. Sementara perantara/tengkulak/ langgan menginginkan pasokan ikan secara kontinyu dari nelayan, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Langgan/tengkulak dalam situasi apapun siap untuk memenuhi kebutuhan nelayan dengan baik. Para pembuat kebijakan juga harus mengakui kredit mikro dan asuransi merupakan layanan penting yang memberikan perantara untuk nelayan, termasuk fakta bahwa lembaga negara tidak mungkin bisa menyamai level yang dirancang secara individual di mana pelanggan dapat menyediakan layanan ini untuk nelayan.

Hubungan “*patron-client*” telah lama berperan dalam pemanfaatan sumber daya laut di Asia Tenggara (Merlijn 1989; Pelras 2000). Sifat dari hubungan tersebut menggambarkan hubungan vertikal, dimana patron sebagai “*superior*” dan client/nelayan sebagai “*inferior*” (Lande, 1977). Meskipun menggambarkan hubungan superior-inferior, namun terjadi hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak (Powel, 1970). “Client”/nelayan menerima ketidaksetaraan karena pelanggan/tengkulak memberikan jaminan sosial dan material dengan imbalan hasil tenaga kerja dan jasa (dalam bentuk ikan). Máñez dan Ferse (2010) berdasarkan indikator pasar, pelanggan/tengkulak berfungsi terutama sebagai inovator bisnis dengan kesediaan untuk membeli semua komoditas ikan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan “*client*” untuk beralih target dalam penangkapan. Secara umum, prosedur pinjaman dan hal-hal terkait disepakati secara informal, *client* mempunyai kewajiban moral untuk menjual semua hasil tangkapan kepada tengkulak/langgan yang memberikan pinjaman.

Budi Wardono: Peranan Kelembagaan Lokal “Blandongan” Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Lamongan

Fakta yang muncul tidak ada pihak yang ingin menyelesaikan hutang-piutang yang berjalan, selama kepercayaan di antara tengkulak/langgan dengan nelayan tersebut masih ada, tidak ada alasan untuk khawatir tentang transaksi keuangan (penyelesaian hubungan hutang piutang). Akibatnya, pembayaran tidak pernah tetap, baik dalam waktu maupun dalam angsuran. Pembayaran tergantung pada hasil tangkapan harian dari nelayan. Merlijn (1989) menyimpulkan, hubungan keseluruhan antara perantara/ tengkulak/langgan dan nelayan, semacam kesepakatan sosial yang saling menguntungkan. Nelayan perlu menjual komoditas ikan yang sangat mudah rusak tanpa penundaan, nelayan perlu memiliki akses langsung ke tengkulak/langgan tanpa jaminan dan tanpa formalitas yang rumit, dan untuk mendapatkan input yang digunakan untuk operasional penangkapan. Sementara perantara/tengkulak/ langgan menginginkan pasokan ikan secara kontinyu dari nelayan, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Langgan/tengkulak dalam situasi apapun siap untuk memenuhi kebutuhan nelayan dengan baik.

Hubungan nelayan dengan langgan/tengkulak dilokasi penelitian menggambarkan hubungan kepentingan ekonomi kedua belah pihak. Kasus di Lamongan nelayan berhubungan dengan langgan/tengkulak untuk mendapatkan biaya operasional dengan imbalan berupa hasil

tangkapan yang dijual ke tengkulak/langgan. Kedua belah pihak bersepakat secara informal/tidak tertulis tentang hak dan kewajiban. Fungsi-fungsi sosial dari kedua belah pihak masih ada, seperti memberi bantuan pada saat paceklik, bantuan bencana dan bantuan hari raya. Keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak bisa dari aspek sosial dan aspek ekonomi (Tabel 4). Peranan lembaga non formal Blandongan berfungsi agar hubungan nelayan dan tengkulak/langgan bisa bersifat saling menguntungkan dan berusaha mengurangi efek negatif dari hubungan tersebut. Hubungan *patron client* tersebut memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak (Tabel 4). Hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak merupakan faktor penting yang harus dikemukakan, karena hubungan kedua belah pihak adalah hubungan ketergantungan yang bersifat mutualisme. Oleh karena itu kedua belah pihak harus memperoleh manfaat positif dari interaksi tersebut. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak harus lebih dikedepankan. Saling ketengantungan yang merupakan salah satu faktor pengikat hubungan *patron-client* tersebut. Kedua belah pihak bisa mengambil keuntungan namun tidak merugikan atau mengeksploitasi pihak yang lemah. Nilai positif keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak tidak hanya semata-mata mengenai bentuk uang (ekonomi) namun motif-motif sosial dan politik juga mempunyai nilai positif dalam hubungan *patron client*.

Tabel 4. Keuntungan hubungan patron client bagi kedua belah pihak

Table 4. Benefit of Patron-Client Relationship

No	Keuntungan Client/Nelayan	No	Keuntungan Patron/Tengkulak/Langgan
1.	Kredit subsisten dan modal investasi	1.	Loyalitas dari nelayan
2.	Pinjaman yang fleksibel	2.	Tenaga kerja
3.	Keamanan selama musim paceklik	3.	Prestise sosial
4.	Peralatan seperti alat tangkap dan kapal	4.	Informasi tentang kompetitor
5.	Payung hukum	5.	Dukungan politik
6.	Akses pasar	6.	Harga produk yang murah
7.	Dukungan personal		
8.	Akses sumber daya		
9.	Akses informasi		

Sumber : Ferrol-Schulte *et al.*, 2014

Sejalan dengan Ferrol-Schulte *et al.*, 2014, kelembagaan lokal Blandongan yang ada di Lamongan merupakan kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan nelayan. Peran yang dibangun kelembagaan Blandongan bertujuan agar masyarakat nelayan dapat mendapat perlindungan dari berbagai hal yang negatif. Peranan kelembagaan lokal dapat dibagi menjadi peran ekonomi, peranan sosial dan peranan politik. Peran-peran tersebut dapat dilakukan karena kelembagaan Blandongan merupakan kelembagaan lokal yang dibangun secara *bottom up* untuk kepentingan nelayan.

Blandongan mewajibkan kepada tengkulak/langgan untuk menyisihkan sebagian dari hasil tangkapan untuk dikelola menjadi biaya “sosial” yang dinamakan dengan “jimpitan” yaitu mengambil sebagian dari hasil tangkapan untuk digunakan sebagai tabungan yang akan dibagikan pada waktu tertentu. Jumlah biaya “sosial” tersebut bisa mencapai 50-60 juta pertahun yang biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan sosial dan kemasyarakatan.

Kesimpulan

Perilaku hubungan nelayan dengan patronnya didasari oleh kepentingan ekonomi, sosial dan politik. Hubungan kedua belah pihak dalam prakteknya lebih banyak merugikan nelayan, sehingga peranan kelembagaan lokal yang kuat mampu menjadi katalisator hubungan patron klien menjadi hubungan yang lebih mengedepankan hubungan yang saling menguntungkan. Kelembagaan lokal Blandongan mampu memerankan sebagai fungsi katalisator hubungan patron client. Kelembagaan lokal mampu memerankan fungsi ekonomi dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan dan sistem bagi hasil yang lebih adil. Fungsi sosial diperankan ketika musim paceklik dimana

kelembagaan lokal Blandongan bisa memainkan peran dalam mengatasi kesulitan nelayan dari “jimpitan” yang dihimpun. Fungsi politik dimainkan dalam kaitan dengan bergaining power hubungan dengan pemerintah terutama dalam penetapan program-program pembangunan perikanan.

Daftar Pustaka

- Allison E.H. and F. Ellis 2001. "The livelihoods approach and management of small-scale fisheries." *Marine policy* 25(5): 377-388.
- Basurto X, Bennett A, Weaver AH, Rodriguez-Van Dyck S, Aceves-Bueno J-S. 2013. "Cooperative and noncooperative strategies for small-scale fisheries' self-governance in the globalization era: implications for conservation." *Ecology and Society* 18(4): 38.
- BBPSEKP [Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan]. 2012. Rekomendasi Kebijakan: Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Perikanan Tangkap Laut Skala Kecil Melalui Fasilitasi Peta Perkiraan '*Fishing Ground*'. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP). Jakarta
- Bene, C. 2006. Small-Scale Fisheries: Assessing Their Contribution To Rural Livelihoods In Developing Countries. FAO Fisheries Circular. No. 1008. Rome, FAO. 2006. 46p.
- Berkes. F., R. Mahon, P. McConney, R. Pollnac and R. Pomeroy. 2001. Managing Small-Scale Fisheries. International Development Research Centre. Ottawa. Canada

Budi Wardono: Peranan Kelembagaan Lokal “Blandongan” Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Lamongan

- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2013. Lamongan Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Lamongan
- Fauzi, A. And Z. Anna. 2010. The Java Sea Small-Scale Fisheries in Changing Environment Experiences From Indonesia IIFET 2010. Montpellier Proceedings
- Fauzi, A. And Z. Anna. 2010. Social resilience and uncertainties: the case of small-scale fishing households in the north coast of Central Java. *MAST* 9(2): 55-64
- Fauzi, A. 2010. Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ferrol-Schulte, D., P. Gorris, W. Baitoningsih, D.S. Adhuri, and S.C.A. Ferse. 2015. Coastal livelihood vulnerability to marine resource degradation: A review of the Indonesian national coastal and marine policy framework. *Marine Policy* 52: 163–171
- Ferrol-Schulte, D., S.C.A. Ferse and M. Glaser. 2014. Patron-Client Relationships, Livelihoods and Natural Resources Management in Tropical Coastal Communities. *Ocean and Coastal Management* 100: 63-73
- Kramer RA, Simanjuntak SM, Liese C. 2002. Migration and fishing in Indonesian coastal villages. *AMBIO: A Journal of the Human Environment* 31:367-72
- Kusnadi. 2002. Akar Kemiskinan Nelayan. LKIS. Yogyakarta.
- Landé, Carl H. 1977. The Dyadic Basis of Clientelism. In *Friends, Followers, and Factions: A Reader in Political Clientelism*. Steffen W. Schmidt, James C. Scott, Carl H Lande, and Laura Gusty, eds. Pp xiii-xxxvii. Berkeley: University of California Press.
- Lunn, K.E., and P. Dearden. 2006. Monitoring small-scale marine fisheries: An example from Thailand's Ko Chang archipelago. *Fisheries Research*. Volume 77(1): 60–71
- Merlijn, A. G. 1989. The role of middlemen in small-scale fisheries: a case study of Sarawak, Malaysia. *Development and Change* 20:683-700. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7660.1989.tb00362.x> <http://dx.doi.org/10.2307/3317878>
- Pelras, C. 2000. Patron-Client Ties Among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi. *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania* 156(3):393-432
- Powell, John D. 1970. Peasant Society and Clientelist Politics. *American Political Science Review* 64(2):411-42
- Salmi, P. 2005. Rural Pluriactivity as a coping Strategy in small-scale fisheries. *Sociologia ruralis*. 45(1):22-36
- Satria, A. 2009. Ekologi Politik Nelayan. PT. LKIS Printing Cemerlang, Bantul, Yogyakarta
- Sievanen L. 2014. How do small-scale fishers adapt to environmental variability? Lessons from Baja California, Sur, Mexico. *Maritime Studies* 13:1-19